

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI**



**RENCANA STRATEGIS
2020-2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Pengantar.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	20
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	20
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Badan P2SDM	23
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	25
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan	25
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing <i>Output</i> Kegiatan	27
3.3. Pengarusutamaan	27
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan	30
4.2. Target Kinerja	31
4.3. Kerangka Pendanaan	31
BAB V. PENUTUP	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1. Lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2015-2019	3
Tabel 2. Fasilitas Sarana dan Prasarana SMK Kehutanan Negeri Manokwari	4
Tabel 3. Fasilitas Peralatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari	5
Tabel 4. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	6
Tabel 5. Struktur Kurikulum 2013 SMK Kehutanan	8
Tabel 6. Minat Masyarakat Masuk SMK Kehutanan Negeri Manokwari	10
Tabel 7. Penyerapan Lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari	10
Tabel 8. Analisis SWOT	18
Tabel 9. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM	25
Tabel 10. Komponen Kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari	27
Tabel 11. Target IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari Per Tahun	31
Tabel 12. Rencana Alokasi Pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2020-2024	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Cascading SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024	30

PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) SMK Kehutanan Negeri Manokwari ini merupakan implikasi dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Sebagai perangkat organisasi lingkungan hidup dan kehutanan renstra ini merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, sasaran strategis dan indikator kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), khususnya yang menangani kegiatan pendidikan formal tingkat menengah kejuruan yang bertujuan menyiapkan peserta didik dalam mendukung terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan adalah lembaga pendidikan formal tingkat menengah kejuruan yang bertujuan menyiapkan peserta didik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini merupakan pedoman kerja bagi SMK Kehutanan Negeri Manokwari agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik, oleh karena itu dibutuhkan penyajian dan arahan yang jelas. Meskipun demikian, karena renstra ini berlaku lima tahun dan harus selalu mengikuti trend perkembangan saat ini, maka renstra ini perlu dilakukan penyempurnaan. Hal ini dibutuhkan sebagai bentuk antisipasi dari terjadinya dinamika perubahan yang terjadi saat ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunya Rencana Strategis ini.



Kepala Sekolah,

Rizard Markus Harson Waas

NIP. 19690607 199503 1 006

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yaitu 5 (lima) SMK Kehutanan Negeri yang menjadi Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan P2SDM. SMKKN tersebut terdapat di 5 (lima) lokasi di seluruh Indonesia, yaitu SMKKN Kadipaten yang berlokasi di Kadipaten dengan wilayah pelayanan Provinsi di seluruh Pulau Jawa dan Bali, SMKKN Pekanbaru yang berlokasi di Pekanbaru dengan wilayah pelayanan seluruh Pulau Sumatera, SMKKN Samarinda yang berlokasi di Samarinda dengan wilayah pelayanan Provinsi di seluruh Pulau Kalimantan, SMKKN Makassar yang berlokasi di Makassar dengan wilayah pelayanan Provinsi seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku Utara dan SMKKN Manokwari yang berlokasi di Manokwari dengan wilayah pelayanan di Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

SMK Kehutanan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat. Dalam melaksanakan tugas tersebut SMK Kehutanan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah.
3. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dan menjamin terlaksananya akuntabilitas kinerja, maka SMK Kehutanan Negeri Manokwari sebagai suatu satuan kerja perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis lingkup Kementerian LHK tahun 2020-2024 dan mengacu pada

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

1.1.1. Capaian Renstra SMKKN Manokwari Tahun 2015-2019

SMK Kehutanan Negeri Manokwari merupakan sekolah dengan sistem *boarding school* yang mewajibkan peserta didik tinggal di asrama selama proses pendidikan. Secara umum animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya di SMK Kehutanan Negeri Manokwari sangat tinggi yang ditandai dengan peningkatan jumlah pendaftar yang setiap tahun. SMK Kehutanan Negeri Manokwari memiliki 2 program studi yaitu jurusan Produksi dan jurusan Konservasi. Jurusan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kebutuhan tenaga teknis kehutanan baik di Papua maupun luar Papua.

Secara umum kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada Tahun 2015-2019 tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi karena terdapat beberapa peserta didik yang mengundurkan diri / pindah sekolah sebelum berakhirnya proses Ujian Akhir berlangsung. Hal tersebut menjadi tugas besar untuk dapat lebih meningkatkan capaian kinerja lulusan agar sebanding dengan input penerimaan peserta didik di awal tahun ajaran. Berikut data lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2015-2019 yaitu:

Tabel.1. Lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target Lulusan	Realisasi Lulusan	Presentase Kelulusan (%)
1	2015	48	47	97,92
2	2016	123	118	95,93
3	2017	53	53	100
4	2018	61	59	96,72
5	2019	46	45	97,83

1.2. Potensi dan Permasalahan

Gambaran atau kondisi riil (*existing condition*) ini perlu diketahui untuk memetakan potensi dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari terkait dengan pengembangannya. Untuk memetakan potensi tersebut, keberadaannya digambarkan dari lingkungan internal dan eksternal yang langsung mempengaruhinya.

Potensi lingkungan internal akan tergambarkan melalui **Strengths** (*kekuatan*) dan **Weakness** (*kelemahan*), sedangkan potensi lingkungan eksternal akan dilihat dari **Opportunities** (*peluang*) dan **Threats** (*ancaman*). Selanjutnya dari pemetaan potensi lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut, dilakukan kajian melalui analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan dan selanjutnya dapat memetakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai profil satuan pendidikan yang telah dirumuskan.

1.2.1. Analisis Lingkungan Internal (SW)

Analisis Lingkungan Internal (SW) dilakukan untuk mengetahui Strengths (*kekuatan*), Weakness (*kelemahan*) dari keberadaan SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Adapun Strengths (*kekuatan*), Weakness (*kelemahan*) tersebut disajikan sebagai berikut :

1. **Strengths (Kekuatan)**

Ada beberapa kekuatan yang dimiliki SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang dapat digambarkan yaitu :

a. **Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pokok**

Fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Manokwari merupakan fasilitas eks Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) yang sudah mengalami perkembangan sejak 5 (lima) tahun terakhir ini. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia tersebut secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Fasilitas Sarana dan Prasarana SMK Kehutanan Negeri Manokwari

No	Nama Barang Milik Negara	Luas (M2)	KONDISI
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	40,716	Baik
2.	Bangunan Ruang Guru	120	Baik
3.	Bangunan Laboratorium Komputer	80	Baik
4.	Bangunan Mushola	61	Baik
5.	Bangunan Kapel	89	Baik
6.	Bangunan Ruang Kelas, Perpustakaan dan Laboratorium	504 (2 Lantai)	Baik
7.	Bangunan Ruang Kelas Baru	138	Baik
8.	Rumah Kepala Sekolah	127	Baik
9.	Rumah KSBTU	80	Baik
10.	Rumah Dinas Wakasek (4 rumah)	74	Baik
11.	Rumas Dinas Pegawai 4 rmh	54	Baik
12.	Bangunan RLPS 2 ruangan	120	Baik
13.	Bangunan Lavatory (2 lantai)	15	Baik
14.	Bangunan Asrama 1	508	Baik
15.	Bangunan Asrama 2	294	Baik
16.	Bangunan Asrama 3	445	Baik
17.	Bangunan Asrama 4	445	Baik
18.	Bangunan Asrama 5	301	Baik
19.	Bangunan Asrama 6	301	Baik
20.	Bangunan Asrama 7	235	Baik
21.	Persemaian semi permanen	135	Baik
22.	Persemaian permanen	204	Baik
23.	Garasi	93	Baik
24.	Lapangan Basket	420	Baik
25.	Pendopo	57	Baik
26.	Garasi	93	Baik
27.	Pos Penjaga	12	Baik

Sumber : SMK Kehutanan Negeri Manokwari, 2019, Secara Lengkap Lihat Laporan BMN

Melihat dari gambaran di atas, terlihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana pokok pada SMK Kehutanan Manokwari dilihat dari standar minimal suatu sekolah sudah cukup tersedia dan memenuhi. Namun demikian fasilitas sarana dan prasarana tersebut perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Adapun peningkatan fasilitas Sarana dan prasarana pembelajaran yang perlu dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Penambahan pagar sekolah.
2. Penambahan 2 unit ruang Teaching Factory.
3. Penambahan 1 unit ruang Laboratorium IPA
4. Penambahan 1 unit ruang UKS.
5. Pembangunan 1 unit Laboratorium Bahasa.

6. Pembangunan Koridor asrama.
7. Renovasi ruangan kelas memenuhi standar berbasis IT.

Tabel 3. Fasilitas Peralatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari

No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi	
			Baik	Rusak
A.	Peralatan Ruang Lab. Komputer			
1.	Komputer PC	30	30	
2.	Komputer Server	1	1	
6.	LCD	1	1	
7.	Printer	1	1	
8.	Modem	2	2	
9.	AC	2	2	
10.	Meja	31	31	
11.	Kursi	31	31	
B.	Peralatan Praktek Lapangan			
1.	Gerobak	5	3	2
2.	Gergaji	6	6	
3.	Gergaji Circular Saw	2	2	
4.	Gergaji Cahin Saw	3	3	
5.	GPS Montana	11	10	1
6.	GPS Garmin 78S	20	13	7
7.	Phiband	10	7	3
8.	Clino meter	30	25	5
9.	Kompas	25	25	
10.	Tandem	5	5	
11.	Haga	10	10	
12.	Spiegel Relesko	2	2	
13.	Teropong	15	15	
14.	Teropong Optik	10	10	
15.	Neraca analitis	5	5	
16.	Alat ukur laser	10	10	
17.	Drone	1	1	
18.	Kamera digital	4	4	
19.	Kamera Trap	2	2	
20.	Rinfainder	4	4	
21.	Apni Level	2	2	
22.	Soil Tester	6	6	
23.	Microscope	2	2	
24.	Lup	15	15	
25.	Moistro Meter	9	9	
D.	Peralatan Keg. Ekstrakulikuler			
1.	Band	1 unit		
2.	Drum band	1 unit		

Sumber : SMK Kehutanan Negeri Manokwari, 2019, Secara Lengkap Lihat Laporan BMN

Dari tabel di atas, tergambar bahwa fasilitas peralatan pada SMK Kehutanan Manokwari dilihat dari standar minimal suatu sekolah sudah cukup tersedia. Namun perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Adapun peningkatan fasilitas peralatan praktik yang perlu dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Pengadaan alat bantu pembelajaran berbasis IT.
2. Penambahan komputer
3. Penambahan peralatan Teaching Factory.
4. Pengadaan peralatan laboratorium Bahasa.
5. Pengadaan lahan praktik (Hutan Diklat).

b. Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memadai

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Statistik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK Kehutanan Negeri Manokwari disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

a) Tabel Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Jenis Pendidikan											Jumlah	
	S3		S2		S1		D3		SMA		SMP		SD
	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non			
1.	-	-	2	3	7	25	2	5	2	25	1	5	77
Jumlah	-	-	2	3	7	25	2	5	2	25	1	5	77

b) Tabel Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berdasarkan golongan

Golongan	Ruang					Jumlah (orang)
	a	b	c	d	e	
I	-	2	-	1	-	3
II	-	1	2	15	-	18
III	2	16	4	2	-	24
IV	1	2	-	-	-	3
Jumlah	3	21	6	18	-	48

Tabel a diatas menunjukkan bahwa tenaga pendidik sebanyak 25 orang terdiri dari PNS sebanyak 12 orang, tenaga kontrak sebanyak 1 orang dan guru tidak tetap sebanyak 12 orang. Sedangkan tenaga kependidikan sebanyak 52 orang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang, tenaga kontrak sebanyak 16 orang.

c. Tersedianya Lokasi Praktek Peserta Didik

SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam kegiatan praktik kejuruan hanya memanfaatkan fasilitas disekitar lingkungan sekolah, sedangkan praktek tahunan untuk kelas X dilaksanakan di KPHP, kelas XI Produksi di IUPHK dan kelas XII Produksi di Perhutani. Sedangkan untuk kelas XI Konservasi di Taman Nasional Manusella dan Kelas XII di Tamnas di pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur secara bergiliran setiap tahunnya.

d. Telah Menggunakan Kurikulum 2013

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Manokwari telah menggunakan Kurikulum 2013. Struktur kurikulumnya meliputi kelompok mata pelajaran wajib dan kejuruan. Selain itu, diprogramkan kelompok mata pelajaran muatan lokal yang disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kondisi wilayah.

Tabel 5. Struktur Kurikulum 2013 SMK Kehutanan

Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi

Program Keahlian : Kehutanan

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU PER MINGGU					
		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2
Kelompok A (Wajib)							
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2
Kelompok B (Wajib)							
7.	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2	2	2
Kelompok C (Peminatan)							
C1. Dasar Bidang Keahlian							
10.	Fisika	2	2	2	2	-	-
11.	Kimia	2	2	2	2	-	-
12.	Biologi	2	2	2	2	-	-
C2. Dasar Program Keahlian							
13.	Silvika	2	2	-	-	-	-
14.	Silvikultur	3	3	-	-	-	-
15.	Ilmu Ukur Kayu	2	2	-	-	-	-
16.	Pengukuran dan Pemetaan Hutan	3	3	-	-	-	-
17.	Dendrologi	3	3	-	-	-	-
18.	Simulasi Digital	3	3	-	-	-	-
19.	Penyuluhan kehutanan	2	2	-	-	-	-
C3. Paket Keahlian							
20.	Paket Keahlian 3 : Teknik Produksi Hasil Hutan						
	1. Inventarisasi Pada Hutan Produksi	-	-	6	6	8	8
	2. Pemanenan Hasil Hutan	-	-	6	6	8	8
	3. Pengujian Kayu Bulat	-	-	6	6	8	8
	Paket Keahlian 4 : Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan						
	1. Inventarisasi Keanekaragaman Hayati	-	-	6	6	8	8
	2. Pembinaan Habitat Dan Populasi	-	-	6	6	8	8
	3. Ekowisata	-	-	6	6	8	8
TOTAL		48	48	48	48	48	48

Melihat dari struktur kurikulum di atas, masih diperlukan peningkatan terutama pada proses pembelajarannya. Adapun proses pembelajaran yang sebaiknya dikembangkan antara lain : Menerapkan pendekatan ilmiah dan penilaian autentik, menggunakan teknologi informasi dan komputerisasi, mengembangkan pembelajaran bahasa asing lain selain bahasa Inggris, mengembangkan pembelajaran praktik menggunakan alat sesuai tuntutan

kompetensi, menerapkan pembelajaran berbasis *Entrepreneurship* serta Melibatkan Industri dalam proses pembelajaran dan penilaian.

e. Paket Keahlian Yang Dibuka Mempunyai Daya Saing

Pendidikan tingkat menengah kehutanan adalah pendidikan formal berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan yang dibuka dengan bidang keahlian : agribisnis dan agroteknologi dan program keahlian : kehutanan serta memiliki 2 (dua) paket keahlian sebagaimana tercantum dalam struktur kurikulum.

Beberapa alasan dan pertimbangan yang mendasari paket keahlian dimaksud mempunyai daya saing antara lain adalah :

- 1) Tenaga teknis menengah kehutanan yang handal sebagai ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan jumlahnya masih sangat terbatas.
- 2) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan memiliki komitmen yang tinggi untuk membina penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan.
- 3) Kementerian Pendidikan sedang mengusahakan peningkatan jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dibandingkan dengan Sekolah Menengah Umum.

f. Tumbuh dan Berkembangnya Beberapa SMK Kehutanan

Sejalan dengan pengembangan SMK Kehutanan Negeri dibawah binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dewasa ini telah tumbuh beberapa SMK Kehutanan yang tersebar dibeberapa daerah. SMK Kehutanan tersebut perlu dibina sehingga kualitas dan kuantitas lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sektor kehutanan.

g. Potensi Peserta Didik Cukup Banyak

Potensi peserta didik sangat ditentukan oleh besarnya minat masyarakat (peserta didik SLTP) untuk masuk mengikuti pendidikan di SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Berdasarkan tabel dibawah ini terlihat bahwa, minat untuk mengikuti pendidikan di SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam

kurun waktu empat tahun terakhir meningkat. Namun demikian, minat masyarakat tersebut masih perlu dibangun melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berupa : perbaikan sistem promosi/publikasi, standarisasi soal test, sistem dan standar penilaian, sistem perekrutan dan lain-lain.

Tabel 6. Minat Masyarakat Masuk SMK Kehutanan Negeri Manokwari

Minat Masyarakat Dalam 4 Tahun Terakhir (Peserta)				Keterangan
2016	2017	2018	2019	
311	232	132	307	Meningkat

h. Lulusan SMK Kehutanan Memiliki Daya Saing

Kualitas dari satuan pendidikan kejuruan sangat ditentukan oleh besarnya lulusan terserap didunia kerja. Berikut ini akan disajikan besarnya penyerapan lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari sampai dengan 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 7. Penyerapan Lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Penyerapan Lulusan		
			Bekerja	Belum Bekerja	Melanjutkan Pendidikan
1.	2017	53	25	26	2
2.	2018	61	18	25	18
3.	2019	45	12	16	17

i. Organisasi Sekolah Telah Tersedia

SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang telah berdiri kurang lebih 11 (sebelas) tahun, telah dapat memenuhi standarisasi organisasi pengelolaan yang telah digariskan. Capaian dari organisasi ini tergambar dari telah adanya izin operasional, nomor (kode) sekolah serta telah terakreditasinya sekolah oleh lembaga yang berwenang.

Sejalan dengan perkembangan organisasi dimaksud, perlu dilakukan peningkatan dalam bentuk : penggunaan aplikasi dan teknologi TIK, peningkatan layanan administrasi sekolah serta peningkatan layanan administrasi kesiswaan.

2. ***Weakness (Kelemahan)***

Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Kelemahan tersebut sebagai berikut :

a. Lingkungan (internal dan eksternal) yang tidak mendukung bagi proses pembelajaran dan bekerja

Letak SMK Kehutanan yang berbatasan langsung dengan lingkungan umum dan masyarakat dan tanpa adanya pagar pembatas berimbas pada situasi yang tidak mendukung pada keamanan, kenyamanan, karakter peserta didik, proses pembelajaran.

Pada level pengawai, kondisi ini mempengaruhi keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

b. Belum Terlaksananya Proses Pembelajaran Sesuai Standar

Proses pembelajaran dan sistem penilaian yang dilaksanakan pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Sebagian besar proses pembelajaran masih dilaksanakan secara konvensional. Proses pembelajaran tersebut sebaiknya dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan.

c. Belum tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai

Jumlah tenaga pendidik PNS yang sedikit berpengaruh pada kegiatan pembelajaran maupun pengawasan terhadap peserta didik. Hal ini kemudian coba diatasi dengan perekrutan Guru Tidak Tetap (12 orang guru) dan tenaga kontrak (1 orang guru). Dibutuhkan penambahan tenaga Pendidik tetap untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik khususnya yang berlatarbelakang teknis kehutanan. Jumlah tenaga kependidikan yang cukup banyak juga belum mampu mendukung proses belajar mengajar yang optimal.

d. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai

Sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki SMK Kehutanan Negeri Manokwari masih belum memadai. Fasilitas seperti laboratorium (komputer,

bahasa, kimia dan biologi), tempat uji kompetensi serta fasilitas teaching factory masih belum dimiliki. Hal ini diakibatkan oleh status lahan yang berimbas pada rencana dan pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut diatas.

e. Sarana Dan Prasarana Pendidikan Belum Berbasis TIK

Fasilitas sarana yang dimiliki SMK Kehutanan Manokwari sebagian sudah dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi tetapi masih belum optimal dari segi penggunaan dan pengelolaannya.

f. Belum Lengkap Dan Memadainya Peralatan Praktek

Salah satu karakteristik dari Sekolah Menengah Kejuruan adalah membutuhkan ketersediaan fasilitas peralatan praktek sesuai dengan dunia kerja (*link and match*). Dalam kurun waktu hampir 7 (tujuh) tahun penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Manokwari, peralatan praktek yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran belum lengkap dan memadai dengan standarisasi yang diharapkan didunia kerja.

g. Perbandingan tenaga pendidik dan kependidikan (PNS) yang tidak ideal (1 : 3)

Perbandingan yang tidak ideal ini berpengaruh pada tidak optimalnya distribusi tupoksi.

h. Jumlah tenaga pendidik non PNS (GTT dan Tenaga Kontrak) yang lebih banyak yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap siswa

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah Guru Kontrak sebanyak 1 orang, dan Guru Tidak Tetap sebanyak 12 orang. Hal ini berimbas pada lemahnya pengawasan peserta didik selama proses dan setelah proses pembelajaran.

i. Kurangnya pemahaman orang tua/ masyarakat terkait dunia kerja lulusan SMK Kehutanan yang berimbas pada rendahnya serapan tenaga kerja.

Pandangan kebanyakan para orang tua peserta didik dan masyarakat yang masih beranggapan bahwa lulusan SMK Kehutanan akan diangkat sebagai

PNS Kehutanan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya keterserapan lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada bidang pekerjaan yang bersesuaian dengan hasil lulusan.

1.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal (OT)

Analisis Lingkungan Eksternal (OT) dilakukan untuk mengetahui opportunities (*peluang*) dan threats (*ancaman*) yang mempengaruhi penyelenggaraan dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Adapun opportunities (*peluang*) dan threats (*ancaman*) tersebut disajikan pada uraian sebagai berikut :

1. Opportunities (Peluang)

Ada beberapa peluang yang mempengaruhi penyelenggaraan dan SMK Kehutanan Manokwari. Peluang tersebut antara lain adalah :

a. Potensi Lapangan Pekerjaan Bagi Lulusan Cukup Tersedia

Potensi lapangan pekerjaan bagi tenaga teknis menengah kehutanan yang dihasilkan dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari, pada dunia usaha kehutanan (swasta) serta BUMN masih cukup terbuka. Disamping itu lapangan pekerjaan yang juga dapat dimasuki oleh tenaga teknis antara :

- 1) **Sektor Pemerintah** : Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, Instruktur Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan, Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS), Teknisi Litkayasa, Tenaga Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 2) **Sektor Swasta/Sektor BUMN** : Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Tenaga Teknis Menengah Kehutanan

b. Terbukanya Kewirausahaan Di Bidang Kehutanan

Dengan adanya kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat, membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Lulusan SMK Kehutanan dapat berwirausaha pada bidang usaha tersebut. Bidang wirausaha yang diharapkan mampu dilaksanakan bagi lulusan :

- 1) Kegiatan aneka usaha kehutanan seperti budidaya lebah madu, budidaya ulat sutra, budidaya rotan dan lain-lain merupakan lapangan berwirausaha di bidang kehutanan yang mempunyai prospek cerah.
- 2) Lulusan SMK Kehutanan juga dapat menjadi pengusaha bibit dan penangkar tanaman langka.
- 3) Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dapat berusaha dibidang jasa lingkungan yaitu wisata dan olah raga tantangan.

c. Adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan SMK

Dewasa ini perhatian pemerintah kepada Sekolah Menengah Kejuruan semakin besar. Hal ini terlihat dari adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan perimbangan jumlah peserta didik SMK yang lebih besar dari SMU, dan hal ini berimbas pada kebijakan Pemerintah yang memberikan porsi penyiapan anggaran yang cukup untuk pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan.

d. Adanya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang peningkatan kualitas penyelenggaraan SMK Kehutanan. Salah satu teknologi yang sekarang berkembang adalah teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dimanfaatkan di bidang kehutanan. Disamping itu, ilmu dan teknologi bidang kehutanan juga terus berkembang yang dapat digunakan untuk pengembangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari.

e. Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Bidang Kehutanan

Dengan telah diterbitkannya Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kehutanan memberikan arah perancangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi lulusan SMK Kehutanan. Standar kompetensi lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SMK Kehutanan adalah standar khusus dan standar internasional.

f. Terbukanya Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SMK Kehutanan

Pembinaan SMK Kehutanan Negeri Manokwari dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Pendidikan. Disamping kedua kementerian tersebut, pembinaan SMK Kehutanan Negeri Manokwari dapat juga melibatkan para pihak seperti negara-negara maju di bidang pendidikan, pemerintah daerah, perusahaan sektor kehutanan, BUMN sektor kehutanan.

2. *Threats (Hambatan)*

Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pengembangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam penyelenggaraan dan pembinaannya. Hambatan tersebut antara lain adalah :

a. Kepastian status hukum lahan yang belum jelas

Kepastian hukum terkait status lahan yang ditempati SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang sampai dengan saat ini masih belum jelas berakibat pada upaya pengembangan fasilitas penunjang baik untuk kegiatan pendidikan (laboratorium, fasilitas Teaching Factory, Tempat uji Kompetensi terstandar), fasilitas asrama, pagar pembatas lingkungan sekolah serta fasilitas sekolah seperti penambahan ruang kelas. Kepastian hukum terkait status lahan ini menjadi sangat penting karena menjadi syarat mutlak dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari.

b. Intervensi eksternal yang mempengaruhi kebijakan sekolah

Intervensi yang terjadi mempengaruhi keputusan-keputusan terkait penegakan aturan maupun kebijakan, Bahkan intervensi ini dapat terjadi pada kondisi yang ekstrem seperti intimidasi dan pemalangan sekolah.

c. Etos kerja pegawai (Guru dan Staf TU) yang makin menurun akibat lemahnya perlindungan dan pengawasan.

Berbagai faktor yang terakumulasi (kondisi internal dan eksternal) pada akhirnya mempengaruhi semangat kerja, tanggungjawab dan kedisiplinan para pegawai.

d. Adanya Kekhawatiran (Output) Lulusan Pendidikan : Mutu Lulusan Yang Tidak Mampu Bersaing Di Pasar Kerja

Kualitas lulusan sangat mempengaruhi eksistensi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang mempengaruhi kualitas lulusan salah satunya adalah proses pembelajaran yang belum terstandar. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu : kemampuan peserta didik, tenaga pendidik, pembiayaan, metode pembelajaran, sarana dan prasarana serta kurikulum. Berkaitan dengan hal dimaksud, seluruh komponen tersebut seharusnya di kelola secara optimal sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

1.2.3. Analisis SWOT

Dari pemetaan potensi lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut, dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan dan selanjutnya memetakan program dan kegiatan.

1. *Faktor Internal (Internal Factors)*

a. *Strengths (Kekuatan)*

- 1) SMK Kehutanan Negeri Manokwari menjadi satu-satunya lembaga pengembangan SDM KLHK di wilayah Indonesia bagian timur.
- 2) Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pokok (berdiri di atas lahan yang bermasalah)
- 3) Tersedianya Lokasi Praktek Peserta Didik
- 4) Telah Menggunakan Kurikulum 2013
- 5) Paket Keahlian Yang Dibuka Mempunyai Daya Saing
- 6) Potensi Peserta Didik Cukup Banyak
- 7) Lulusan SMK Kehutanan Memiliki Daya Saing
- 8) Organisasi Sekolah Telah Tersedia

b. *Weakness (Kelemahan)*

- 1) Lingkungan (internal dan eksternal) yang tidak mendukung bagi proses pembelajaran dan bekerja
- 2) Belum Terlaksananya Proses Pembelajaran Sesuai Standar
- 3) Belum tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memadai
- 4) Sarana Dan Prasarana Pendidikan yang belum memadai (tidak bisa/tidak ada pembangunan fisik)
- 5) Fasilitas asrama yang belum memadai (tidak bisa/tidak ada pembangunan fisik)
- 6) Belum Lengkap Dan Memadainya Peralatan Praktek
- 7) Perbandingan tenaga pendidik dan kependidikan (PNS) yang tidak ideal (1 : 3)
- 8) Jumlah tenaga pendidik non PNS (GTT dan Kontrak) lebih banyak yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap siswa

2. *Faktor Eksternal (External Factors)*

a. *Opportunities (Peluang)*

- 1) Potensi Lapangan Pekerjaan Bagi Lulusan Cukup Tersedia
- 2) Terbukanya Kewirausahaan Di Bidang Kehutanan
- 3) Adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan SMK
- 4) Adanya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- 5) Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Bidang Kehutanan
- 6) Terbukanya Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SMK Kehutanan

b. *Threats (Ancaman)*

- 1) Kepastian Status hukum lahan SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang belum jelas
- 2) Intervensi eksternal yang mempengaruhi kebijakan sekolah
- 3) Semangat kerja pegawai (Guru dan Staf TU) yang makin menurun akibat lemahnya perlindungan dan pengawasan
- 4) Kurangnya pemahaman orang tua/masyarakat terkait dunia kerja lulusan SMK Kehutanan yang berimbas pada rendahnya serapan tenaga kerja.
- 5) Adanya Kekhawatiran (*Output*) Keluaran Pendidikan : Mutu Lulusan Yang Tidak Mampu Bersaing di Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Tabel 8. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Internal Factor</p> <p style="text-align: center;">External Factor</p>	<p style="text-align: center;">Strengths (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pokok 2. Tersedianya Lokasi Praktek Peserta Didik 3. Telah Menggunakan Kurikulum 2013 4. Paket Keahlian Yang Dibuka Mempunyai Daya Saing 5. Potensi Peserta Didik Cukup Banyak 6. Lulusan SMK Kehutanan Memiliki Daya Saing 7. Organisasi Sekolah Telah Tersedia 	<p style="text-align: center;">Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan yang tidak mendukung bagi proses pembelajaran 2. Belum Terlaksananya Proses Pembelajaran Sesuai Standar 3. Belum tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memadai 4. Sarana Dan Prasarana Pendidikan yang belum memadai (tidak bisa/tidak ada pembangunan fisik) 5. Fasilitas asrama yang belum memadai (tidak bisa/tidak ada pembangunan fisik) 6. Belum Lengkap Dan Memadainya Peralatan Praktek 7. Perbandingan tenaga pendidik dan kependidikan (PNS) yang tidak ideal (1 : 3) 8. Jumlah tenaga pendidik non PNS (GTT dan Kontrak) lebih banyak yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap siswa
<p style="text-align: center;">Opportunities (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Lapangan Pekerjaan Bagi Lulusan Cukup Tersedia 2. Terbukanya Kewirausahaan Di Bidang Kehutanan 3. Adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan SMK 4. Adanya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 5. Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Bidang Kehutanan 6. Terbukanya Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SMK Kehutanan 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan manajemen sekolah sesuai dengan standarisasi 2. Peningkatan layanan satuan pendidikan (SMK) kepada para pihak 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan standarisasi 2. Penyediaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standarisasi 4. Meningkatkan Fasilitas Asrama sesuai dengan standarisasi
<p style="text-align: center;">Threats (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian Status hukum lahan SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang belum jelas 2. Intervensi eksternal yang mempengaruhi kebijakan sekolah 3. Semangat kerja pegawai (Guru dan Staf TU) yang makin menurun akibat lemahnya perlindungan dan pengawasan 4. Kurangnya pemahaman orang tua/masyarakat terkait dunia kerja lulusan SMK Kehutanan yang berimbas pada rendahnya serapan tenaga kerja. 5. Adanya Kekhawatiran (Output) Luaran Pendidikan : Mutu Lulusan Yang Tidak Mampu Bersaing Di Pasar Kerja 	<p style="text-align: center;">Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi di dunia usaha dan dunia industri 	<p style="text-align: center;">Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan status hukum lahan lokasi SMK Kehutanan Negeri manokwari

Dari Analisis SWOT di hasilkan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan status hukum lahan SMK Kehutanan Negeri Manokwari
2. Mengembangkan manajemen sekolah sesuai dengan standarisasi
3. Meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan standarisasi
4. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standarisasi
6. Meningkatkan Fasilitas Asrama sesuai dengan standarisasi
7. Peningkatan layanan satuan pendidikan (SMK) kepada para pihak
8. Meningkatkan kapasitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi di dunia usaha dan dunia industri.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah: **"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"**. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : **"KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"**, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu **"Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"**. Pernyataan pada misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut misi KLHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sebagai penjabarannya, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan dari KLHK untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden tersebut, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Kementerian LHK juga memiliki 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis untuk mempercepat dalam mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

1. Kesetaraan gender
2. Tata kelola pemerintahan yang baik
3. Pembangunan berkelanjutan
4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
5. Modal sosial dan budaya
6. Transformasi digital

Rumusan tujuan KLHK disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024, rumusan visi dan misi KLHK, serta penyelarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*). Tujuan KLHK adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM KLHK;
5. Meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sasaran strategis KLHK disusun dengan menjabarkan tujuan KLHK, juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi KLHK, rumusan sasaran strategis KLHK adalah:

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim (SS-1)

Indikator pada SS-1 adalah:

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;
 - 3) Penurunan Laju Deforestasi;
 - 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
 - 5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;
 - 6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)
2. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (SS-2)

Indikator pada SS-2 adalah:

- 1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;
- 2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;
- 3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (SS-3)

Indikator pada SS-3 adalah:

- 1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;
 - 2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
 - 3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
4. Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)

Indikator pada SS-4 adalah:

- 1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan;
- 2) Penyelesaian Kasus bidang LHK;
- 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE);
- 4) Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif;
- 5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK;
- 6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;
- 7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK;
- 8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Badan P2SDM

Mengacu pada arahan Presiden yang menyatakan bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka visi misi Badan P2SDM juga mengacu pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***. Selain itu Visi BP2SDM juga mengacu pada rumusan Visi KLHK yaitu ***"KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"***.

Dengan mengacu pada misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu ***"Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"***. Badan P2SDM memiliki program dan kegiatan

yang berfokus untuk mendukung terlaksananya semua misi KLHK yang sudah dirumuskan yaitu: (1) Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas; (2) Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing; serta (4) Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik. Berdasarkan tugas dan fungsi BP2SDM, misi KLHK yang sangat terkait langsung dengan BP2SDM adalah misi ketiga.

Berdasarkan visi, misi KLHK yang telah dijelaskan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **"Meningkatkan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan"**. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumberdaya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat dan memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 KLHK yaitu "Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)". Indikator utama yang didukung oleh Badan P2SDM (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (3) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK; dan (4) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK. Untuk mendukung indikator utama tersebut, Badan P2SDM memiliki 5 (lima) indikator kinerja program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan.

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Berdasarkan program pada Badan P2SDM, terdapat enam kegiatan pada lingkup Badan P2SDM. Untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan, sasaran dan indikator kinerja disusun secara relevan seperti yang tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 9. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Perencanaan Pengembangan SDM	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak & SDM LHK kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK • Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK • Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten • Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK • SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa • Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Nilai KHDTK yang dikelola
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan
5	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KTH Mandiri Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya) Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal
6	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (K6)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Level Maturitas SPIP Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK

Sesuai dengan tugas dan fungsi SMK Kehutanan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang merupakan bagian dari kegiatan "Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan" dengan sasaran kegiatan "Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan" dan Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) "Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang berkompeten dan bersertifikat".

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan

Berdasarkan tahapan atau bagian yang digunakan untuk menunjang pencapaian dari kegiatan "Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan" dengan sasaran kegiatan "Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan" dan Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) "Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang berkompeten dan bersertifikat" maka disusunlah Komponen Kegiatan dengan rumusan setiap tahun seperti pada tabel berikut:

Tabel 10. Komponen Kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)	Komponen Kegiatan	Satuan
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan			
	Sasaran : Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan		
	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat		Orang
		a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	
		b. Penetapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015	
		c. Dokumen perencanaan dan pembinaan	
		d. Publikasi pendidikan	
		e. Kerjasama pendidikan	
	Layanan Perkantoran		Layanan
		a. Gaji dan Tunjangan	
		b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	

3.3. Pengarusutamaan

Salah satu dasar kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah pengarusutamaan. Kementerian LHK memiliki 6 (enam) kebijakan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif untuk mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

1. Kesetaraan gender

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian LHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kebijakan percepatan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK

antara lain melalui: (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (f) Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (g) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. SMK Kehutanan Negeri Manokwari saat ini memang belum maksimal dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Semoga kedepannya SMK kehutanan Negeri Manokwari dapat melaksanakan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender dengan maksimal.

2. Tata kelola pemerintahan yang baik

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pembangunan berkelanjutan

Kebijakan Kementerian LHK dalam pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kementerian LHK dalam mengurangi kerentanan bencana, yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas yaitu (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3)

ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.

5. Modal sosial dan budaya

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan pada 4 (empat) program prioritas, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, (2) Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, (3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

6. Transformasi digital

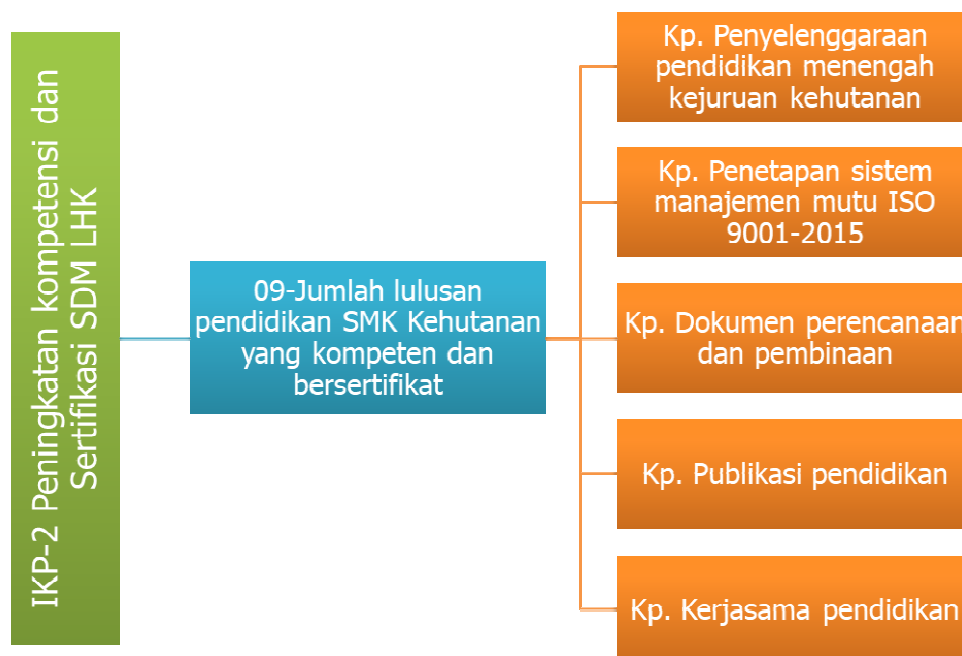
Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan Big Data.

SMK Kehutanan Negeri Manokwari akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan keenam kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Perumusan sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari disusun berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan Badan P2SDM dengan mengacu dari sasaran strategis Kementerian LHK yang telah disusun. Sebagai penjabaran dan penyelarasan sasaran program dan sasaran kegiatan pada Badan P2SDM dengan sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari disusun peta *cascading* seperti gambar berikut. *Cascading* tersebut disusun untuk dapat mengetahui konsistensi antara rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan yang telah disusun Badan P2SDM dengan sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan yang telah disusun SMK Kehutanan Negeri Manokwari untuk mendukung pencapaian *output*.



Gambar 1. Cascading SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024

4.2. Target Kinerja

Target yang terdapat pada indikator kinerja kegiatan Badan P2SDM yaitu "Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat" merupakan target yang akan dicapai oleh SMK Kehutanan Negeri Manokwari hingga Tahun 2024. Rincian besaran target IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 11, dengan rincian target per tahun sebagai berikut:

Tabel 11. Target IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari Per Tahun

Sasaran IKK	IKK SMKKN Manokwari	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
04-Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	09-Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	orang	73	66	73	70	90

4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, rencana alokasi anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan sebagaimana tercantum pada Renstra Badan P2SDM Tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 687.875.000.000. Anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target dan kemampuan kelembagaan dan SDM yang dimiliki, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 12. Rencana Alokasi Pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	109.375	121.900	136.000	151.600	169.000	687.875

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan P2SDM dan Rencana Strategis Kementerian LHK. Rencana program, kegiatan dan komponen SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024 yang disusun merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan, terutama dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Disadari bahwa pada saat penyusunan rencana dipengarungi oleh banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji. Sasaran kegiatan di SMK Kehutanan Negeri Manokwari sangat dipengaruhi oleh kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kebijakan nasional. Beberapa langkah pembaruan juga dilakukan guna mendukung kebijakan Presiden RI dan Pemerintah saat ini, serta perkembangan teknologi yang semakin berkembang.

Rencana Strategis SMK Kehutanan Manokwari Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan, upaya dan kerja keras dari segenap unsur jajaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang harus dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Matriks Target Kinerja dan Alokasi Pendanaan Rencana Strategis Satuan Kerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Prog /Keg	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
	Sasaran Strategis 4 - Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing												
	IKU 13 – Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan												
	IKU 18 - Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK												
	IKU 19 – Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK												
	IKU 20 - Level Maturitas SPIP KLHK												
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM												
	Sasaran Program (Outcome) 2 - Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK												
	IKP 2 - Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Orang											
	Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan							109,37	121,9	136	151,6	169	Pusdiklat dan SMKKN
	Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan												
	IKK 9 - Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	472	473	473	473	473						
	IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari	Orang	73	66	73	70	90						
	a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan												
	b. Penetapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015												
	c. Dokumen perencanaan dan pembinaan												
	d. Publikasi pendidikan												
	e. Kerjasama pendidikan												